

ABSTRAKSI

Redistribusi tanah obyek landreform merupakan kebijakan pemerintah dalam menerapkan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960, suatu usaha melindungi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian dan sekaligus memperkuat bukti pemilikan hak atas tanahnya dengan memberikan sertipikat hak atas tanah. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mendapat jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Sebagai bentuk realisasi dari pendaftaran tersebut, maka bagi penerima hak redistribusi akan diberikan tanda bukti hak atas tanah redistribusi. Tanda bukti hak mana selanjutnya akan dipergunakan dasar untuk mendaftarkan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Redistribusi dapat disejajarkan dengan Surat Keputusan Pemberian Hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Apabila terdapat kesalahan penerbitan sertipikat atas tanah yang berasal dari redistribusi, maka dapat dimohonkan pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak maupun sertipikat atas tanah tersebut. Pembatalan tersebut sebagai wujud perlindungan hukum represif bagi penerima hak redistribusi.

Kata kunci : Redistribusi tanah, Tanda Bukti Hak, Surat Keputusan Redistribusi.